

**HAMBATAN PELAKSANAAN PERANAN POLISI DALAM
PENGAMANAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DI POLRES
MALANG KOTA**

**(Implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia)**

ARTIKEL ILMIAH

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum**

Disusun:

SAFIRA ANGELA ISLAMI

0910110229



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2013

**HAMBATAN PELAKSANAAN PERANAN POLISI DALAM
PENGAMANAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DI POLRES
MALANG KOTA**

**(Implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 201 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia)**

Safira Angela Islami

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

ABSTRAK

Permohonan pengamanan eksekusi jaminan fidusia kepada polisi dapat dilakukan apabila pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang akan dilakukan dirasa dapat membahayakan para pihak dalam perjanjian jaminan fidusia. Sejak diberlakukannya Perkapolri No 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia terdapat 2 (dua) laporan pengaduan eksekusi jaminan fidusia oleh debitur kepada Polres Malang Kota. Hambatan dalam pelaksanaan peranan Polisi dalam pengamanan eksekusi objek jaminan fidusia dapat digolongkan menjadi 3 yaitu, hambatan struktural, hambatan substansi dan hambatan kultur hukum. Hambatan struktural terkait dengan lembaga pendaftaran sertifikat jaminan fidusia hanya ada satu di tiap provinsi sehingga jangka waktu selesainya pembuatan sertifikat jaminan fidusia terlalu lama, selain itu pada awal diberlakukannya Perkapolri No 8 Tahun 2011 anggota polri sebagai pihak yang berperan dalam pengamanan eksekusi objek jaminan fidusia banyak yang belum memahami prosedur pengamanannya. Hambatan substansi terkait dengan Perkapolri No 8 Tahun 2011 tidak menjelaskan pengertian eksekusi jaminan fidusia yang memerlukan pengamanan dari Polri. Hambatan kultur hukum yaitu kurang fahamnya masyarakat terhadap hukum terlebih mengenai jaminan fidusia dan banyaknya pendapat bahwa Polri tidak memiliki wewenang dalam pengamanan eksekusi jaminan fidusia.

Kata kunci: peranan polisi, pengamanan eksekusi, eksekusi jaminan fidusia.

ABSTRACT

Fiduciary safeguards execution petition to the police can be done if the implementation of the execution will be jeopardize the parties to the fiduciary agreement. Since the enactment of Perkapolri No. 8 of 2011 on the Execution Fiduciary Security there are 2 (two) fiduciary execution complaints by the debtor to the Malang City Police. The obstructions of the police's role implementation on fiduciary safeguards execution can be classified into 3, there are structural barriers, substance barriers and law cultural barriers. Structural barriers related to fiduciary agency registration certificate is only one in each province so that the completion of the period of fiduciary certificates, too long, in addition to the earlier enactment Perkapolri No. 8 of 2011 as the national police members were instrumental in securing the execution object fiduciary many do not understand

the security procedures. The substance's obstruction is related to Perkapolri No. 8 of 2011, which does not explain the meaning of the police's security need of fiduciary safeguard execution. The law cultural obstruction is related to the people's less acknowledge about law, especially for fiduciary safeguards and there a lot opinions say that police have not role to secure fiduciary safeguard execution..

Keyword: the role of the police, securing execution, execution fiduciary.

A. Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan masyarakat, maka pemenuhan kebutuhan juga ikut berkembang. Hal itu berdampak terhadap meningkatnya kebutuhan pendanaan. Sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam. Pemberian pinjaman atau kredit dapat dilakukan oleh perseorangan maupun oleh lembaga keuangan, baik lembaga keuangan depository maupun lembaga keuangan non depository. Selain itu, koperasi simpan pinjam atau koperasi serba usaha yang merupakan badan usaha juga memiliki kegiatan memberi pinjaman atau kredit.

Lembaga keuangan adalah badan usaha yang memiliki kekayaan dalam bentuk aset keuangan (mayoritas), dimana kekayaan aset ini dipergunakan untuk menjalankan usaha di bidang jasa keuangan (pembiayaan dan non pembiayaan). Lembaga keuangan dapat dikelompokkan menurut kemampuannya menghimpun dana dari masyarakat secara langsung yaitu lembaga keuangan depository dan lembaga keuangan non depository. Lembaga keuangan depository menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan misalnya giro, tabungan atau deposito berjangka yang diterima dari penabung. Lembaga keuangan yang menawarkan jasa-jasa seperti ini adalah bank-bank.

Lembaga keuangan non depository (lembaga keuangan bukan bank) adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya bersifat kontraktual, investasi dan pemberian modal atau pembiayaan. Lembaga keuangan yang kegiatan usahanya bersifat kontraktual yaitu menarik dana dari masyarakat dengan menawarkan kontrak untuk memproteksi penabung terhadap risiko ketidakpastian misalnya polis asuransi, program pensiun. Kelompok lembaga

keuangan ini dapat disebut perusahaan asuransi dan dana pensiun. Lembaga keuangan investasi yaitu lembaga keuangan yang kegiatannya melakukan investasi di pasar uang dan pasar modal, misalnya perusahaan efek, reasuransi. Lembaga keuangan yang kegiatan usahanya memberi modal atau pembiayaan yaitu perusahaan modal ventura dan lembaga pembiayaan yang menawarkan jasa pembiayaan sewa guna, anjak piutang, pembiayaan konsumen dan kartu kredit.

Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.¹ Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit.² Sedangkan pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.³ Kebutuhan konsumen meliputi pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan alat-alat rumah tangga, pembiayaan barang-barang elektronik dan pembiayaan perumahan.⁴

Pada kegiatan pembiayaan konsumen terdapat suatu perjanjian pembiayaan yang pada pokoknya hampir sama dengan perjanjian kredit. Perjanjian pembiayaan konsumen adalah jenis perjanjian kredit yang tergolong dalam sale kredit, yaitu pemberian kredit untuk pembelian suatu barang dan nasabah akan menerima barang tersebut. Jadi konsumen tidak menerima uang secara tunai, tetapi hanya menerima barang yang dibeli dengan kredit tersebut.

Perjanjian pembiayaan konsumen juga termasuk perjanjian pokok yang dapat diikuti dengan perjanjian tambahan yaitu perjanjian jaminan. Jaminan yang digunakan adalah jaminan fidusia karena objek dari perjanjian pembiayaan konsumen adalah benda bergerak. Lembaga jaminan fidusia di

¹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Pasal 1 angka 1.

² Ibid. angka 2.

³ Ibid. angka 7.

⁴ Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/Pmk.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, Pasal 6 ayat 2.

Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF).

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.⁵

Pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Apabila pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Peraturan mengenai jaminan fidusia tidak mengatur lebih lanjut berkaitan dengan pihak yang berwenang untuk dimintai bantuan dalam eksekusi jaminan fidusia. Oleh karena itu, POLRI sebagai alat negara yang bertugas dan berperan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, berwenang memberikan bantuan pengamanan pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi jaminan fidusia. Eksekusi Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga memerlukan pengamanan dari POLRI. oleh karena itu dibentuklah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Sejak diberlakukannya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia pada bulan Juni tahun 2011 sampai bulan Oktober tahun 2011, sudah ada 9 (sembilan) permohonan pengamanan eksekusi jaminan fidusia kepada

⁵ Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1.

Polres Malang Kota yang diajukan oleh lembaga pembiayaan.⁶ Pada 1 (satu) laporan terdapat beberapa materi permohonan pengamanan eksekusi jaminan fidusia yang berbeda. Namun pada jangka waktu itu pula terdapat 2 (dua) laporan pengaduan eksekusi jaminan fidusia oleh debitur kepada Polres Malang Kota.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana peranan polisi dalam pelaksanaan pengamanan eksekusi objek jaminan fidusia di Polres Malang Kota menurut Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Polres Malang Kota dalam menjalankan perannya sebagai pengaman eksekusi jaminan fidusia?

C. Metode penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis.⁷ Yuridis yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji hambatan pelaksanaan peranan polisi dalam pengamanan eksekusi objek jaminan fidusia dalam berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Sosiologis yaitu penelitian ini dilaksanakan dalam masyarakat khususnya di Polres Malang Kota.

Penelitian ini menggunakan dua teknik pengolahan data, yaitu:

1. Data primer

Wawancara yaitu proses tanya jawab secara langsung antar peneliti dengan dengan pihak terkait pengamanan eksekusi jaminan fidusia.
2. Data sekunder
 - a. Studi dokumentasi yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan pencatatan terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengamanan eksekusi jaminan fidusia.

⁶ Hasil wawancara prasurvey kepala bagian hukum Polres Malang Kota tanggal 1 November 2012 pukul 09.30 wib.

⁷ Soemitro, Roni Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1988, hlm. 106.

- b. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku, literatur-literatur, perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

D. Pembahasan

1. Gambaran umum lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polres Malang Kota yang terletak di Jalan Jaksa Agung Suprpto 19 Kota Malang. Daerah hukum Polres Malang Kota adalah Kecamatan Lowokwaru, Kecamatan Klojen, Kecamatan Sukun, Kecamatan Kedung Kandang dan Kecamatan Blimbing.

Mengenai tugas dan wewenang masing-masing bagian diterangkan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor. Polres bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Peranan Polisi dalam Pelaksanaan Pengamanan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia di Polres Malang Kota menurut Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia

Menurut kamus lengkap Bahasa Indonesia, peran adalah yang diperbuat, tugas, hal yang besar pengaruhnya pada suatu peristiwa.⁸ Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto adalah peran merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan.⁹ Apabila seseorang melaksanakan

⁸Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 1997, hlm. 420.

⁹Carapedia, *Definisi Peran*, 3 November 2011 (online), carapedia.com/pengertian_definisi_peran_info2184.html diakses pada tanggal 19 September 2012.

hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.

Levinson dalam Soekanto mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain:¹⁰

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat;
- b. Peranan merupakan suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi;
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.

Analisa terhadap perilaku peranan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan:¹¹

- a. Ketentuan peranan
Ketentuan peranan adalah pernyataan formal dan terbuka tentang perilaku yang harus ditampilkan oleh seseorang dalam membawa perannya.
- b. Gambaran peranan
Gambaran peranan adalah suatu gambaran tentang perilaku yang secara aktual ditampilkan seseorang dalam membawakan perannya.
- c. Harapan peranan
Harapan peranan adalah harapan orang-orang terhadap perilaku yang ditampilkan seseorang dalam membawakan perannya.

Berdasarkan analisis terhadap peranan, POLRI sebagai alat negara yang bertugas dan berperan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, berperan pula untuk memberikan bantuan pengamanan

¹⁰ Dirno Kaghoo, *Teori Peranan*, 30 November 2010 (online), <http://kaghoo.blogspot.com/2010/11/pengertian-peranan.html> diakses pada tanggal 29 November 2012.

¹¹ Setia Budi, 30 Juli 2010 (online), *Pengertian Peran*, <http://www.damandiri.or.id/file/setiabudiipbtinjauanpustaka.pdf>, diakses pada tanggal 29 November 2012.

pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi jaminan fidusia. Pasal 15 ayat 2 UUJF menerangkan bahwa sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga memerlukan pengamanan dari Polri. Oleh karena itu dibentuklah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Tujuan dibentuknya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia adalah terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan serta terlindunginya keselamatan dan keamanan Penerima Jaminan Fidusia, Pemberi Jaminan Fidusia dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan jiwa

Permohonan pengamanan eksekusi jaminan fidusia kepada Polisi dapat dilakukan apabila pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang akan dilakukan dirasa dapat membahayakan para pihak dalam perjanjian jaminan fidusia.¹² Indikator bahwa pelaksanaan eksekusi itu dapat membahayakan adalah:

- a. Dilihat dari tempramen dan reaksi masyarakat di lingkungan sekitar, apabila masyarakat memiliki tempramen tinggi, maka dikhawatirkan akan terjadi perlawanan yang dapat melukai fisik kreditur maupun masyarakat saat kreditur akan melakukan pengambilan barang. Contohnya ketika masyarakat di lokasi tempat pengambilan barang merupakan suku yang terkenal memiliki tempramen tinggi, maka mereka akan bersatu untuk menentang apa yang akan dilakukan kreditur, tidak jarang mereka melakukan kekerasan kepada kreditur agar kreditur tidak jadi mengambil barang milik debitur.
- b. Dilihat dari watak debitur lalai, apabila debitur lalai memiliki watak keras dan tidak mau menyerahkan objek jaminan fidusia, maka dikhawatirkan terjadi perkelahian untuk memperebutkan objek

¹² Hasil wawancara Survey dengan Kepala Sub Bagian Hukum Polres Malang Kota tanggal 12 Februari 2013 pukul 11.00 am WIB.

jaminan fidusia karena kreditur juga tidak dapat menahan emosinya. Contohnya ketika debitur lalai memiliki watak keras, maka akan terjadi perdebatan antara debitur dan kreditur karena debitur enggan menyerahkan barang. Apabila kreditur dapat menjaga emosi, maka perdebatan akan segera usai namun apabila kreditur juga ikut emosi, maka perdebatan dikhawatirkan berlanjut pada perkelahian.

Pengamanan terhadap objek jaminan fidusia dapat dilaksanakan dengan persyaratan yang diatur dalam pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, yaitu:

- a. ada permintaan dari pemohon;
- b. memiliki akta jaminan fidusia;
- c. jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia;
- d. memiliki sertifikat jaminan fidusia;
- e. jaminan fidusia berada di wilayah negara Indonesia.

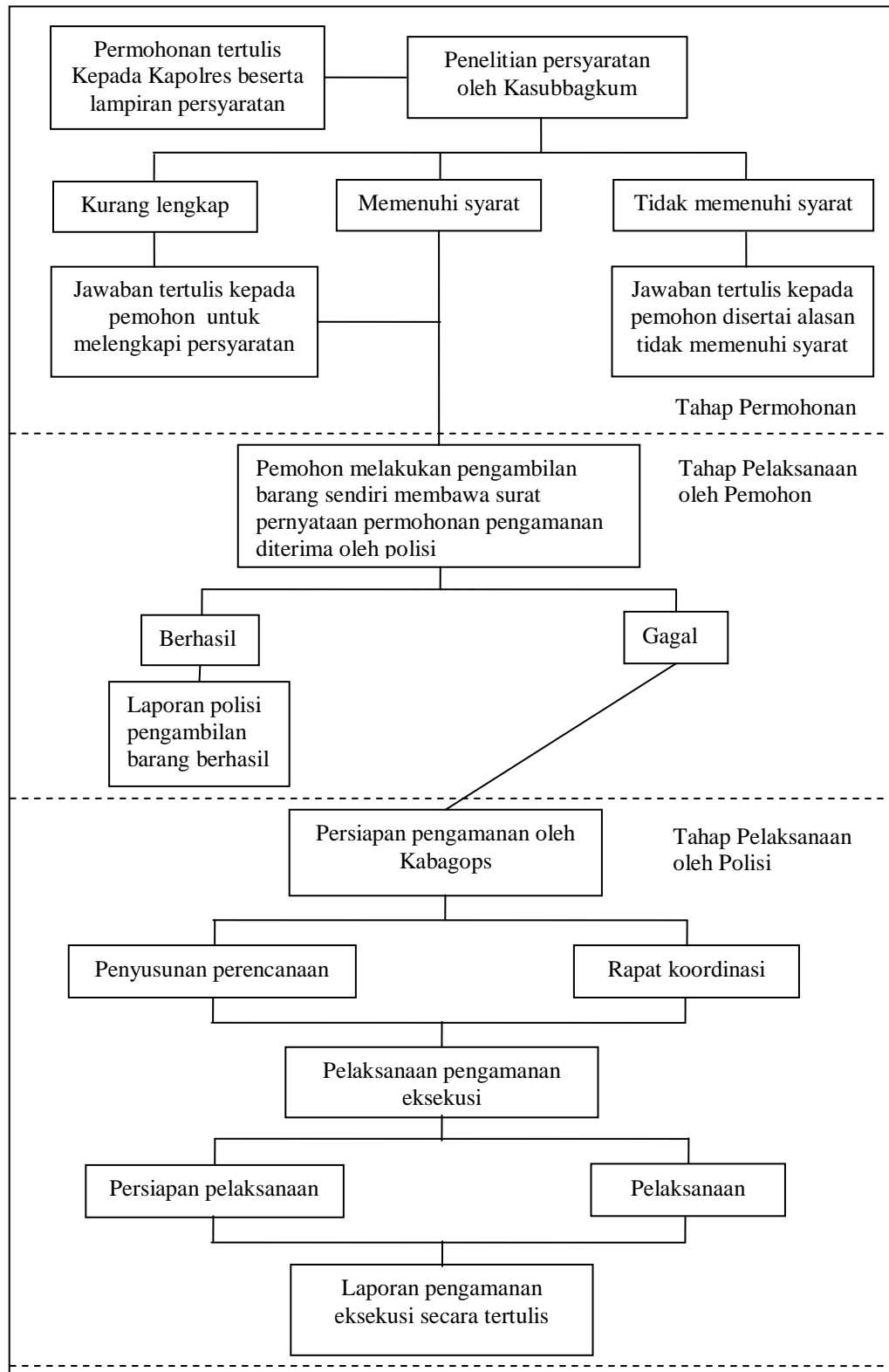
Prosedur pengamanan eksekusi jaminan fidusia di Polres Malang Kota dilakukan dengan 2 tahap, yaitu:

- a. tahap permohonan;
- b. tahap pelaksanaan;

Dua tahap pengamanan eksekusi jaminan fidusia di Polres Malang Kota dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut:

Bagan 3

Prosedur Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia di Polres Malang Kota



Sumber: Data sekunder diolah 2013

Permohonan pengamanan eksekusi objek jaminan fidusia di Polres Malang Kota diajukan oleh kreditur kepada Kepala Polres (Kapolres) secara tertulis dengan melampirkan berkas-berkas, yaitu:

- a. Salinan akta jaminan fidusia
- b. Salinan sertifikat jaminan fidusia

Tujuan dilampirkan sertifikat jaminan fidusia adalah sebagai bukti bahwa kreditur memiliki kekuatan eksekutorial terhadap benda atau objek jaminan fidusia. Pendaftaran sertifikat jaminan fidusia di Jawa Timur diajukan kepada Kantor Wilayah Hukum dan Ham provinsi yang terletak di Surabaya. Banyaknya pihak yang mengadakan perjanjian jaminan fidusia dan harus mendaftarkan sertifikat jaminan fidusia hanya pada satu tempat, mengakibatkan sertifikat jaminan fidusia biasanya baru jadi setelah 3 sampai 4 bulan dihitung dari tanggal pendaftaran. Apabila dalam kurun waktu tersebut ada konsumen yang lalai, sedangkan harus segera dilakukan eksekusi, maka sertifikat jaminan fidusia diwakili dengan surat tanda daftar sertifikat jaminan fidusia yang mencantumkan nomor registrasi.¹³ Nomor registrasi ini sama dengan nomor sertifikat jaminan fidusia.

- c. Surat peringatan atau somasi kepada konsumen untuk memenuhi kewajibannya.

Pada perjanjian kredit atau pembiayaan konsumen terdapat klausula yang menyatakan bahwa konsumen wajib membayar angsuran satu bulan sekali per tanggal perjanjian pembiayaan dibuat.¹⁴ Apabila konsumen lalai atau telat dalam pembayaran, maka FIF berhak untuk mengingatkan. Apabila setelah diingatkan melalui lisan tetap tidak diindahkan, maka FIF memberi somasi pada konsumen. Somasi sebagai syarat dalam permohonan pengamanan eksekusi oleh polisi minimal sudah dilakukan 2 kali. Tujuan pelampiran somasi yaitu

¹³ Hasil wawancara survey dengan Bapak Prambono selaku bagian litigasi FIF Cabang Kota Malang tanggal 15 Februari 2013 pukul 11.00 am WIB.

¹⁴ Hasil wawancara survey dengan Bapak Prambono selaku bagian litigasi FIF Cabang Kota Malang tanggal 15 Februari 2013 pukul 11.00 am WIB.

membuktikan bahwa konsumen tidak memiliki itikad baik untuk membayar angsuran walaupun sudah diberi somasi.

d. Identitas pelaksana eksekusi

Dilampirkan identitas pelaksana eksekusi yang telah diutus oleh FIF berupa Kartu Tanda Penduduk.

e. Surat Tugas Pelaksanaan Eksekusi

Surat tugas pelaksanaan eksekusi ini dibuat oleh FIF kepada karyawan yang diberi kuasa untuk melakukan eksekusi. Surat tugas dibuat oleh bagian litigasi dari FIF.

f. Berkas tambahan sebagai pertimbangan pemberian izin pendampingan

Berkas-berkas yang juga harus dilampirkan selain 5 berkas yang diatur dalam pasal 8 ayat 1 Perkapolri No 8 Tahun 2011, yaitu perjanjian kredit atau pembiayaan yang telah dibuat oleh konsumen dan kreditur, identitas konsumen dan benda yang akan dieksekusi dan bukti angsuran yang telah dibayarkan oleh konsumen.¹⁵

Perjanjian yang dilampirkan oleh FIF adalah baku perjanjian pembiayaan konsumen yang terdiri dari perjanjian pembiayaan konsumen, surat kuasa pembebanan jaminan fidusia, surat persetujuan suami atau istri konsumen, salinan surat jalan yang diberikan oleh dealer atau suplier kepada konsumen, dan bukti pembayaran sejumlah uang dari dealer bahwa perusahaan pembiayaan konsumen telah membayar lunas benda yang dibeli oleh konsumen.

Bukti angsuran yang telah dibayarkan oleh konsumen juga dilampirkan untuk mengetahui kepatutan konsumen dalam membayar angsuran tiap bulannya.¹⁶

Kemudian Kapolres menyerahkan berkas-berkas permohonan kepada Kepala Sub Bagian Hukum (Kasubbagkum) untuk dilakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan dalam permohonan pengamanan. Setelah melakukan penelitian, Kasubbagkum memberikan

¹⁵ Hasil wawancara Survey dengan Kepala Sub Bagian Hukum Polres Malang Kota tanggal 12 Februari 2013 pukul 11.00 am WIB.

¹⁶ Hasil wawancara Survey dengan Kepala Sub Bagian Hukum Polres Malang Kota tanggal 12 Februari 2013 pukul 11.00 am WIB.

saran tertulis kepada Kapolres atas terpenuhi atau tidaknya persyaratan permohonan pengamanan eksekusi. Dalam hal persyaratan permohonan pengamanan dinyatakan kurang lengkap, Kapolres memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan. Dalam hal permohonan pengamanan dinyatakan tidak memenuhi syarat, Kapolres memberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasannya. Apabila permohonan pengamanan yang dinyatakan memenuhi syarat, maka Kapolres memberitahukan kepada pemohon bahwa permohonan pengamanan telah memenuhi syarat dan diterima, kemudian Kapolres memerintahkan Kepala Bagian Operasional (Kabagops) untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan pengamanan eksekusi.

3. Hambatan yang Dihadapi oleh Polres Malang Kota dalam Menjalankan Perannya sebagai Pengaman Eksekusi Jaminan Fidusia

Hambatan yang dihadapi oleh Polres Malang Kota dalam menjalankan perannya sebagai pengaman eksekusi jaminan fidusia dikaji berdasarkan Teori Lawrence Friedmann, 3 (tiga) komponen sistem hukum yakni:¹⁷

Struktur, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakupi antara lain Kepolisian dengan para Polisinya, Kejaksaan dengan para Jaksanya, Pengadilan dengan para Hakimnya;

Substansi, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.

Kultur Hukum yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan), kebiasaankebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Hambatan struktural yang ada dalam pengaman eksekusi objek jaminan fidusia oleh Polri yaitu lembaga pendaftaran sertifikat jaminan fidusia hanya ada satu di tiap provinsi sehingga jangka waktu selesainya

¹⁷ Yady, Abdul Razak, Aswanto, *Problematika Penegakan Hukum di Indonesia Menuju Hukum yang Responsif Berlandaskan Nilai-Nilai Pancasila*, Hasil Penelitian tidak diterbitkan, Makasar, Universitas Hasanudin, Hlm. 6.

pembuatan sertifikat jaminan fidusia terlalu lama. Permohonan pengamanan objek jaminan fidusia, diperlukan sertifikat jaminan fidusia. Sertifikat jaminan fidusia didaftarkan di kantor wilayah hukum dan ham. Namun kantor wilayah hukum dan ham di tiap provinsi hanya ada 1 tempat, di Jawa Timur hanya ada di Surabaya. Hal itu tidak seimbang dengan banyaknya sertifikat jaminan fidusia yang harus didaftarkan dari setiap daerah pada satu provinsi itu. Akibat yang timbul adalah sertifikat jaminan fidusia baru selesai setelah 3-4 bulan dari tanggal pendaftaran. Oleh karena itu perlu disediakan tempat pendaftaran sertifikat jaminan fidusia di tiap kabupaten seperti halnya pendaftaran sertifikat jaminan hak tanggungan untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Hambatan substansi yang dihadapi yaitu undang-undang jaminan fidusia maupun peraturan pelaksanaannya tidak mengatur lebih lanjut mengenai tata cara eksekusi objek jaminan fidusia, sehingga pihak kreditur yang akan melakukan eksekusi jaminan fidusia menggunakan cara yang menurut mereka benar. Akibatnya eksekusi jaminan fidusia sering dianggap tindak perampasan. Selain itu dalam undang-undang jaminan fidusia tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai pihak yang berwenang untuk dimintai bantuan melakukan eksekusi jaminan fidusia, hal itu menimbulkan multitafsir.

Perkapolri No 8 Tahun 2011 tidak menjelaskan pengertian eksekusi jaminan fidusia yang memerlukan pengamanan dari Polri. Sehingga menimbulkan spekulasi bahwa Polri sebenarnya tidak memiliki peran dalam pengamanan eksekusi jaminan fidusia. Jika dianalisis dari Perkapolri No 8 Tahun 2011, eksekusi yang dimaksud adalah saat pengambilan benda objek jaminan fidusia dari penerima fidusia yang telah lalai dan tidak mau menyerahkan benda secara sukarela, sedangkan berdasarkan pasal 29 UUJF eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. pelaksanaan titel eksekutorial oleh Penerima Fidusia;

- b. penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Hambatan yang termasuk dalam kultur hukum adalah masyarakat kurang paham mengenai jaminan fidusia, sehingga sering kali mereka menyepelekan ketika mereka melalaikan kewajibannya untuk membayar angsuran tiap bulan. Masyarakat menganggap bahwa pihak kreditur tidak memiliki hak eksekusi, sehingga setiap dilakukannya eksekusi masyarakat menganggap itu adalah suatu tindak perampasan. Selain itu, masyarakat juga kurang paham bahwa benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak dapat dipindah tangankan karena melanggar ketentuan pasal 23 ayat 2 UUF, yaitu Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia. Pelanggaran tersebut dapat dijerat dengan pasal 36 UUF yaitu Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah.

Sering kali terjadi saat eksekusi akan dilakukan, benda objek jaminan fidusia sudah beralih kepada orang lain. Sehingga jalan yang ditempuh oleh pihak kreditur adalah melaporkan tindakan pengalihan tersebut kepada Polri dengan alasan melanggar ketentuan pasal 23 ayat 2 UUF

E. Kesimpulan dan saran

1. Kesimpulan

Hambatan dalam pelaksanaan peran polisi dalam pengamanan eksekusi jaminan fidusia dapat dilihat melalui tiga hal, yaitu:

- a. Hambatan struktural yang ada dalam pengamanan eksekusi objek jaminan fidusia oleh Polri yaitu Lembaga pendaftaran sertifikat jaminan fidusia hanya ada satu di tiap provinsi sehingga jangka waktu selesainya pembuatan sertifikat jaminan fidusia terlalu lama, sedangkan salah satu syarat yang harus dilampirkan dalam permohonan pengamanan eksekusi jaminan fidusia adalah sertifikat jaminan fidusia. Pada awal diberlakukannya Perkapolri No 8 Tahun 2011, anggota Polri sebagai pihak yang berperan dalam pengamanan eksekusi objek jaminan fidusia banyak yang belum memahami prosedur pengamanannya, hal itu dirasa merugikan bagi pihak kreditur, karena jangka waktu permohonan pengamanan eksekusi dengan pelaksanaan eksekusi berlangsung lama.
- b. Hambatan substansi yang ada dalam pelaksanaan pengamanan eksekusi jaminan fidusia yaitu Perkapolri No 8 Tahun 2011 tidak menjelaskan pengertian eksekusi jaminan fidusia yang memerlukan pengamanan dari Polri. Sehingga menimbulkan pandangan bahwa Polri sebenarnya tidak memiliki peran dalam pengamanan eksekusi jaminan fidusia.
- c. Hambatan yang termasuk dalam kultur hukum yaitu Masyarakat kurang paham mengenai jaminan fidusia, sehingga sering kali mereka menyepelekan ketika mereka melalaikan kewajibannya untuk membayar angsuran tiap bulan. Masyarakat juga kurang paham bahwa benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak dapat dipindah tangankan karena melanggar ketentuan pasal 23 ayat 2 UUF. Hal itu yang menyebabkan pelaksanaan eksekusi tertunda karena ketika pihak kreditur dan Polri datang untuk mengambil barang, barang tersebut tidak ada di tempat sehingga jangka waktu pelaksanaan eksekusi berlangsung lama.

- a. Kreditur melakukan eksekusi dengan cara yang mereka anggap benar dan sudah menjadi budaya sebagai dampak tata cara eksekusi jaminan fidusia yang tidak diatur secara pasti dalam undang-undang. Masih banyak kreditur yang kurang memahami bahwa polisi dapat mendampingi mereka dalam pengamanan eksekusi jaminan fidusia apabila ada keadaan yang dapat membahayakan para pihak.
- b. Anggapan dari Polri dan kreditur bahwa tidak diperlukan bukti tertulis dalam pembuktian pelaksanaan pengambilan barang, hanya dibuktikan secara lisan dan menggunakan kepercayaan. Ketika permohonan pengamanan eksekusi jaminan fidusia dinyatakan lengkap dan diterima oleh polisi, kreditur diberi bukti tertulis. Kreditur melakukan pengambilan barang sendiri kepada debitur lalai dengan bukti tertulis tersebut dan mengatakan bahwa apabila debitur tidak mau menyerahkan barang, maka kreditur akan mengajak anggota polri untuk melakukan pengambilan barang. Ketika pengambilan barang sendiri itu berhasil, maka pengambilan barang dinyatakan selesai dan polri tidak perlu melakukan pengamanan eksekusi jaminan fidusia langsung. Namun ketika hal itu gagal, kreditur datang kepada polri untuk melakukan pengamanan eksekusi jaminan fidusia. Tidak ada bukti tertulis dalam hal kreditur berhasil atau tidak dalam pelaksanaan pengambilan barang.

2. Saran

- a. Bagi Polri, agar memberikan sosialisasi lebih lanjut kepada anggota Polri sendiri, Lembaga-lembaga yang mengadakan perjanjian jaminan fidusia dan masyarakat perihal eksistensi jaminan fidusia dan peranan polisi dalam pengamanan eksekusi jaminan fidusia.
- b. Bagi Kreditur, agar lebih memperhatikan prinsip 5C (Collateral, Capacity, Character, Capital dan Condition of economy) dalam memberikan fasilitas kredit maupun pembiayaan agar tidak terjadi debitur lalai yang memerlukan eksekusi jaminan fidusia.

- c. Bagi Masyarakat, agar mencari pemahaman bagaimana eksistensi jaminan fidusia dan menghindari kelalaian dalam perjanjian kredit maupun pembiayaan dengan perjanjian tambahan jaminan fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 1997.

Soemitro, Roni Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1988.

Undang-undang

Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan

Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/Pmk.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia

Internet

Carapedia, *Definisi Peran*, 3 November 2011 (online), carapedia.com/pengertian_definisi_peran_info2184.html diakses pada tanggal 19 September 2012.

Dirno Kaghoo, *Teori Peranan*, 30 November 2010 (online), <http://kaghoo.blogspot.com/2010/11/pengertian-peranan.html> diakses pada tanggal 29 November 2012.

Setia Budi, 30 Juli 2010 (online), *Pengertian Peran*, <http://www.damandiri.or.id/file/setiabudiipbtinjauanpustaka.pdf>, diakses pada tanggal 29 November 2012.

Artikel Ilmiah

Yadyn, Abdul Razak, Aswanto, *Problematika Penegakan Hukum di Indonesia Menuju Hukum yang Responsif Berlandaskan Nilai-Nilai Pancasila*, Hasil Penelitian tidak diterbitkan, Makasar, Universitas Hasanudin